

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Pusaka Setia, Bandung;
- Kadir Muhammad, Abdul, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta;
- Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Simanjuntak, Payman J., 2003, *Undang-Undang yang Baru Tentang Ketenagakerjaan*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudii, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta;
- Soemitro, Roni Hanitio, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Soepomo, Imam, 1988, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Pramita, Jakarta;
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Tjandra, Surya, dan Suryomenggolo, 2002, *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta;
- Triwulan Tutik, Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta;
- Uwiyono, Aloysius Hoesein, dan Suryandoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada, Depok;

Wahyudi Eko, Yulianingsih dan Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta;

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-11/Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 487;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian, Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

III. Karya Ilmiah/Jurnal/Naskah Publikasi

Budijanto, Oki Wahju, 2017, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Volume 17 Nomor 3, September 2017*, Kementerian Hukum dan HAM RI;

- Freddy Busroh, Firman, 2017, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM*;
- Hidayah, Khoirul, 2015, *Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang, Jurnal Syariah dan Hukum de Jure*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Kalsum, Umi, *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang yang Melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Publikasi Ilmiah*;
- Kasino, Yulius, 2007, *Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur di Perusahaan menurut Hukum Positif, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta;
- Prayudo, Galih, 2018, *Problematisasi Pelaksanaan Pengawasan Penerapan Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta;
- Purcahyono, Dicky, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Supir Truk Antar Propinsi Ditinjau dari Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Surabaya;
- Situmorang, Basani, dkk., 2010, *Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, Laporan Pengkajian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM;
- Tjiknang, Hermain, 2007, *Penegakan Hukum Perburuhan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta;
- Tri Budhayati, Christiana, 2009, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Widya Sari Vol. 10 No. 3 Januari 2009*, Fakultas Hukum UKSW Salatiga;

IV. Lain-Lain

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Tentang Kemnaker (Informasi mengenai Sejarah Kemnaker, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat Kemnaker*,

<https://kemnaker.go.id/information/about>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

Miranti Karunia, Ade, *Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan Tak Sebanding Jumlah Perusahaan yang Diawasi*, <https://money.kompas.com/read/2020/06/15/210000226/menaker--pengawas-ketenagakerjaan-tak-sebanding-jumlah-perusahaan-yang-diawasi>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

Rommala, Syiti, *Konsultasi HR: Apa Arti 1/173 dalam Menghitung Upah Lembur Karyawan?* <https://www.gadjian.com/blog/2018/01/16/konsultasi-hr-apa-arti-angka-1-173-dalam-menghitung-upah-lembur-karyawan/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

V. Lampiran (Dokumen Studi Kasus)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, *Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Lembur atas Sopir Pengiriman PT. X Nomor 566/1479/PPK/DTKT/2018 tanggal 5 September 2018*;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, *Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Lembur atas Sopir Pengiriman PT. X Nomor 566/3194/PPK/DTKT/2019 tanggal 25 November 2019*;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, *Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Lembur atas Sopir Pengiriman PT. X Nomor 566/3195/PPK/DTKT/2019 tanggal 25 November 2019*;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, *Tanggapan Pengaduan Waktu Kerja dan Upah Lembur Nomor 560/476.1/UPTD.WIL.II/III/2020 tanggal 30 Maret 2020*;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, *Permohonan Bantuan Pertimbangan Penyelesaian Permasalahan di PT. X Nomor 560/477.I/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 30 Maret 2020*;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, *Upah Kerja Lembur Driver Delivery PT. X Nomor 560/1862/UPTD-WIL.II/2020 tanggal 31 Agustus 2020*;

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Pertimbangan Penyelesaian Permasalahan di PT. X Nomor B-5/597/AS.00/02/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;*

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Surat Jawaban Sistem Poin Ritase pada PT. X Nomor B-5/775/AS.00.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020;*

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja LEM-SPSI, *Pengaduan Waktu Kerja dan Upah Lembur Nomor 25/PUK SP LEM/SPSI/ORG/PWK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.*